PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2025

Dafa Fadil Adama
NPP. 33.0288
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: dafaadama35@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Hardiyanto Rahman, S.IP., M.Si
Email: Hardiyantorahman@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Voter participation in the 2025 Regional Head Election (Pilkada) of Pesawaran Regency recorded a significant decline, reaching only 64.5%, the lowest level since 2015. While prior research has examined education as a determinant of political participation, most studies were conducted in urban areas of developed countries, leaving a significant empirical and practical knowledge gap in the context of rural areas (rural area) in developing countries such as Indonesia. No comprehensive study had previously linked education level and voter participation specifically in Pesawaran Regency.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the influence of education level on voter participation in the 2025 Pesawaran Regency Regional Election.* ***Method:*** *This study uses a quantitative approach with simple linear regression. Data were collected through questionnaires distributed to 103 respondents selected through stratified purposive sampling, stratified by education level (primary, secondary, higher education). Data validity was tested using Pearson correlation and reliability using Cronbach's Alpha. Classical assumption tests (normality and heteroskedasticity) were performed prior to regression analysis. The study was conducted in Pesawaran Regency, Lampung Province from January to March 2026.* ***Result:*** *The analysis found that education level does not have a significant influence on voter participation, with a significance value of 0.552 (> 0.05). The coefficient of determination (R Square) of 0.003 indicates that education level explains only 0.3% of the variation in political participation, with the remaining 99.7% explained by other factors outside the model. Descriptive analysis revealed differences in cognitive patterns between respondents with higher and lower education, particularly in the dimensions of cognitive capacity and political literacy, while political efficacy showed relatively similar patterns across both groups.* ***Conclusion:*** *Education level is not the primary factor determining voter participation in Pesawaran Regency. Social and cultural factors, political trust, and community mobilization are more dominant. It is recommended that local governments and the KPU develop community-based political education programs, strengthen public trust in the democratic process, and optimize voter socialization using digital media and community approaches.*

Keywords: *Education Level; Pesawaran Regency; Political Participation; Regional Election; Rural Area.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 mencatat penurunan signifikan hingga hanya 64,5%, terendah sejak 2015. Meskipun berbagai studi telah mengkaji pendidikan sebagai faktor penentu partisipasi politik, sebagian besar penelitian berfokus pada wilayah perkotaan di negara maju, sehingga

terdapat kesenjangan empiris dan praktis yang signifikan terkait konteks *rural area* di negara berkembang seperti Indonesia. Belum ada penelitian komprehensif yang secara khusus mengaitkan tingkat pendidikan dengan partisipasi pemilih di Kabupaten Pesawaran. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2025. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linear sederhana. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 103 responden yang dipilih melalui *stratified purposive sampling* berdasarkan strata pendidikan (dasar, menengah, tinggi). Pengujian validitas dilakukan dengan korelasi Pearson dan reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*. Uji asumsi klasik (normalitas dan heteroskedastisitas) dilakukan sebelum analisis regresi. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, pada bulan Januari hingga Maret 2026. **Hasil/Temuan:** Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih, dengan nilai signifikansi 0,552 (> 0,05). Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,003 mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan hanya menjelaskan 0,3% variasi partisipasi politik, sedangkan 99,7% dipengaruhi faktor lain di luar model. Analisis deskriptif menemukan perbedaan pola kognitif antara responden pendidikan tinggi dan rendah, terutama pada dimensi kapasitas kognitif dan literasi politik, sementara dimensi *political efficacy* menunjukkan pola yang relatif serupa antar kelompok. **Kesimpulan:** Tingkat pendidikan bukan faktor utama penentu partisipasi pemilih di Kabupaten Pesawaran. Faktor sosial budaya, kepercayaan politik, dan mobilisasi komunitas lebih dominan. Disarankan agar pemerintah daerah dan KPU mengembangkan program pendidikan politik berbasis komunitas, memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta mengoptimalkan sosialisasi pemilih melalui media digital dan pendekatan berbasis komunitas.

Kata kunci: *Area Pedesaan; Kabupaten Pesawaran; Partisipasi Politik; Pilkada; Tingkat Pendidikan.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung mencatat fenomena yang memprihatinkan, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Ulang Tahun 2025 hanya mencapai 64,5 persen, turun signifikan dari 75,09 persen pada Pilkada 2020 (KPU Kabupaten Pesawaran, 2025). Kabupaten ini merupakan satu-satunya dari tiga daerah yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayahnya, menjadikannya kasus yang sangat relevan untuk dikaji.

Secara demografis, mayoritas penduduk Kabupaten Pesawaran berpendidikan dasar ke bawah. Data Katadata Media Network (2024) menunjukkan bahwa 29,78 persen penduduk tidak atau belum pernah bersekolah, 24,6 persen hanya lulusan SD, dan 17,43 persen lulusan SMP. Penduduk yang menempuh pendidikan tinggi hanya sekitar 2,9 persen dari total 494.183 jiwa. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Pesawaran sebagai *rural area* yang representatif untuk mengkaji hubungan antara tingkat pendidikan dan partisipasi politik dalam konteks demokrasi lokal Indonesia.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang membentuk kesadaran dan perilaku politik seseorang (Persson, 2015). Studi tata kelola adalah bidang studi yang mempelajari manifestasi pemerintahan melalui perilaku pejabat pemerintah, proses aktivitas pemerintah, dan konsekuensi sosial dari tindakan pemerintah (Pitono et al., 2023). Teori *Education and Political Participation* menjelaskan bahwa pendidikan dapat meningkatkan kapasitas kognitif, literasi

politik, dan *political efficacy* individu sehingga mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam proses demokrasi. Politik hukum sendiri merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk dan mengembangkan sistem hukum untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara . Namun, sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu linier dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, serta karakteristik wilayah (Bolqiah, 2025; Karolčík dkk., 2025). Kondisi inilah yang menjadikan penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan empiris pada konteks *rural area* Indonesia.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan penurunan partisipasi pemilih di Kabupaten Pesawaran pada Pilkada Ulang 2025, sementara literasi politik masyarakat yang rendah dan keterbatasan pendidikan formal menjadi tantangan utama dalam mendorong partisipasi yang berkualitas. Terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang signifikan: Pertama, sebagian besar penelitian yang mengkaji hubungan pendidikan dan partisipasi politik berfokus pada wilayah perkotaan di negara maju (Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Australia), sehingga belum merepresentasikan karakteristik *rural area* di negara berkembang seperti Indonesia. Analisis bibliometrik terhadap 187 publikasi di Scopus (2021-2025) menunjukkan minimnya kemunculan kata kunci *rural area* atau *rural voters* dalam literatur internasional. Kedua, belum tersedia data komprehensif yang secara simultan mengaitkan variabel tingkat pendidikan dan partisipasi politik di Kabupaten Pesawaran. Ketiga, fenomena penurunan partisipasi pada PSU 2025 belum teruji secara akademik, sehingga memperkuat urgensi penelitian ini.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Pesawaran sebagai dasar perumusan strategi oleh KPU dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori *Education and Political Participation* (Persson, 2015) dengan menambahkan perspektif empiris dari konteks *rural area* Indonesia yang selama ini belum banyak tereksplorasi. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan penyelenggara pemilu akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami akar permasalahan rendahnya partisipasi, sehingga strategi peningkatan partisipasi berisiko tidak tepat sasaran dan kurang efektif dalam kondisi masyarakat pedesaan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh sejumlah kajian terdahulu yang relevan. Sadeli (2025) menemukan korelasi positif antara pendidikan demokrasi dan partisipasi politik mahasiswa Indonesia ($r = 0{,}412$; $p < 0{,}001$) melalui survei kuantitatif terhadap 250 mahasiswa dari lima universitas. Penelitian ini memiliki kesamaan subjek (generasi muda), namun berbeda lokus karena berfokus pada lingkungan kampus, bukan pemilih di *rural area*. Azhari dkk. (2025) menemukan pengaruh sangat kuat pendidikan politik terhadap partisipasi Generasi Z ($r = 0{,}847$; kontribusi 71,75%), namun variabel yang diukur adalah *pendidikan politik* bukan tingkat pendidikan formal. Firdauziawati & Yudianto (2025) mengkaji pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi di Pilkada Trenggalek ($r = 0{,}508$; kontribusi 25,8%), memiliki kesamaan variabel namun lokus berbeda—penelitian ini hadir sebagai perbandingan konteks antara wilayah di Jawa dan Lampung. Bolqiah (2025) menemukan bahwa pendidikan tidak selalu menghasilkan konsistensi perilaku politik, temuan yang relevan untuk memahami konteks Pesawaran. Karolčík dkk. (2025) menunjukkan bahwa literasi politik yang efektif membutuhkan pendidikan kontekstual berkelanjutan. Afzal *et al.* (2024) menegaskan bahwa pendidikan merupakan prediktor penting partisipasi pemilih, namun berbeda konteks karena menggunakan data CCES di Amerika Serikat. Eda (2024) menjelaskan mekanisme pendidikan terhadap *voter turnout* melalui

civic duty dan *political efficacy*. Putra dkk. (2023) menegaskan bahwa pendidikan pemilih yang kontekstual dan partisipatif lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi dibandingkan pendidikan formal semata.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dari beberapa dimensi. Dari segi lokus dan konteks, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang secara empiris mengkaji pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi pemilih di Kabupaten Pesawaran—khususnya dalam konteks PSU Tahun 2025—yang merupakan satu-satunya daerah di Lampung yang melaksanakan PSU di seluruh TPS se-kabupaten. Dari segi pendekatan analisis, penelitian ini mengintegrasikan analisis bibliometrik berbasis Scopus sebagai dasar pemetaan *research gap* global dengan penelitian kuantitatif di tingkat lokal, sebuah kombinasi yang belum dilakukan dalam konteks Pesawaran. Dari segi temuan, penelitian ini menghasilkan bukti empiris yang menantang asumsi teoritis bahwa pendidikan formal secara langsung meningkatkan partisipasi politik, dengan menemukan bahwa faktor sosial, budaya, dan kepercayaan politik lebih dominan di *rural area* Indonesia.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 di Provinsi Lampung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode statistik inferensial korelasional. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel tingkat pendidikan (X) terhadap partisipasi politik (Y) pemilih secara empiris melalui data numerik dan teknik statistik yang terukur (Syahza, 2021). Analisis dilakukan menggunakan aplikasi SPSS 25 dengan regresi linear sederhana.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disusun berdasarkan teori *Education and Political Participation* Persson (2015) dengan tiga dimensi untuk masing-masing variabel: tingkat pendidikan diukur melalui kapasitas kognitif, literasi politik, dan *political efficacy*; partisipasi politik diukur melalui partisipasi elektoral, partisipasi institusional, dan *political discussion and expression*. Kuesioner menggunakan Skala Likert 1-5. Data sekunder diperoleh dari KPU Kabupaten Pesawaran, BPS, dan Databoks Katadata.

Penentuan responden menggunakan teknik *stratified purposive sampling* dengan stratifikasi berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah, tinggi). Responden dipilih secara purposif dengan kriteria: berdomisili di Kabupaten Pesawaran, terdaftar dalam DPT, dan telah menggunakan hak pilih pada Pilkada 2025. Berdasarkan rumus Slovin dengan *margin of error* 10% dari populasi pemilih aktif sekitar 140.000 jiwa, diperoleh 100 responden. Setelah penyaringan data, analisis dilakukan terhadap 103 responden yang memenuhi kriteria.

Pengujian kualitas instrumen dilakukan melalui uji validitas menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* (r-tabel = 0,163; n = 103) dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* (batas minimum 0,60). Seluruh item dinyatakan valid (r-hitung 0,179-0,610) dan reliabel (variabel X: $\alpha = 0{,}630$; variabel Y: $\alpha = 0{,}601$). Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas menggunakan *Normal P-P Plot* dan uji heteroskedastisitas menggunakan *Scatterplot*, keduanya terpenuhi. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, selama Januari hingga Maret 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Penulis menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 menggunakan teori *Education and Political Participation* dari Persson (2015) yang mencakup tiga dimensi tingkat pendidikan (kapasitas kognitif, literasi politik, *political efficacy*) dan tiga dimensi partisipasi politik (partisipasi elektoral, partisipasi institusional, *political discussion and expression*). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kapasitas Kognitif

Dimensi kapasitas kognitif menjelaskan kemampuan individu dalam memahami isu publik, menganalisis informasi politik, dan membandingkan visi-misi kandidat secara rasional. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan tinggi (Diploma dan S1/D4, 59% responden) cenderung memberikan jawaban *setuju* hingga *sangat setuju* pada indikator-indikator kapasitas kognitif, sementara responden dengan pendidikan rendah lebih banyak berada pada kategori *netral* hingga *setuju*.

Namun demikian, temuan menarik ditemukan pada perilaku memilih aktual. Sebagian besar masyarakat masih lebih dipengaruhi oleh kedekatan sosial, loyalitas kelompok, dan pengaruh tokoh masyarakat dibandingkan evaluasi rasional terhadap program kandidat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan kapasitas kognitif antar kelompok pendidikan, faktor lingkungan sosial dan budaya lokal justru lebih dominan dalam menentukan perilaku politik. Temuan ini berbeda dengan teori Persson (2015) yang menyatakan semakin tinggi pendidikan semakin tinggi kapasitas kognitif politiknya, namun kontekstual dengan kondisi *rural area* di mana norma sosial kolektif lebih berpengaruh.

3.2. Literasi Politik

Dimensi literasi politik mencakup kemampuan mengenali sumber informasi yang kredibel, membedakan fakta dan hoaks, serta mengevaluasi kinerja pemerintah secara objektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan tinggi menunjukkan kecenderungan lebih baik dalam mengenali sumber informasi politik yang kredibel dan membedakan informasi faktual dengan hoaks. Namun, perbedaan antar kelompok ini tidak terlalu besar dan tidak berdampak signifikan terhadap partisipasi pemilih secara keseluruhan.

Rendahnya literasi politik secara umum terlihat dari masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap informasi dari tokoh masyarakat dan media sosial tanpa proses verifikasi yang memadai. Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong peningkatan pemanfaatan layanan teknologi oleh masyarakat (Wiramadana et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh isu emosional dan politik identitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Bolqiah (2025) yang menyatakan bahwa pendidikan tidak selalu mampu membentuk konsistensi perilaku politik apabila tidak diiringi dengan literasi politik yang baik, serta penelitian Karolčík dkk. (2025) yang menegaskan bahwa literasi politik yang efektif harus dibangun melalui pendidikan politik yang kontekstual, bukan hanya melalui pendidikan formal semata.

3.3. *Political Efficacy*

Dimensi *political efficacy* merujuk pada keyakinan individu bahwa partisipasi politiknya memiliki makna dan dapat memengaruhi hasil pemilu. Temuan menarik ditemukan bahwa baik responden dengan pendidikan tinggi maupun rendah menunjukkan kecenderungan jawaban yang relatif serupa pada dimensi ini, terutama pada indikator keyakinan bahwa suara mereka

berpengaruh terhadap hasil Pilkada. Hal ini mengindikasikan bahwa *political efficacy* tidak sepenuhnya ditentukan oleh tingkat pendidikan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan pengalaman politik individu.

Rendahnya *political efficacy* secara umum tercermin dari penurunan partisipasi pemilih pada PSU 2025 menjadi 64,5 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya *political fatigue*, rendahnya kepercayaan terhadap sistem politik, serta kurang efektifnya sosialisasi pemilu. Temuan ini sejalan dengan Afzal *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa pendidikan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik apabila tidak disertai dengan *political trust* dan motivasi politik yang kuat.

3.4. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Partisipasi Pemilih

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,552 (> 0,05), yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2025. Dengan demikian, hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Hasil koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,003 mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan hanya mampu menjelaskan 0,3% variasi partisipasi politik, sedangkan 99,7% dipengaruhi variabel lain di luar model.

Tabel 1.
Ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana

Variabel	Nilai B (Koefisien)	t Hitung	Sig.
Konstanta	42,257	13,054	0,000
Tingkat Pendidikan (X)	0,096	0,597	0,552
R Square	0,003 (0,3%)		

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS (2026)

Persamaan regresi yang terbentuk adalah Y = 42,257 + 0,096X, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan tingkat pendidikan hanya meningkatkan partisipasi politik sebesar 0,096 dalam skala yang sangat kecil dan tidak bermakna secara statistik. Dalam konteks masyarakat Kabupaten Pesawaran, partisipasi politik lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial budaya: kedekatan sosial dengan kandidat, pengaruh tokoh masyarakat atau elite lokal, mobilisasi politik oleh tim sukses, serta faktor pragmatis seperti loyalitas kelompok.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih di Pesawaran berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya. Berbeda dengan temuan Sadeli (2025) yang menemukan korelasi positif r = 0,412, temuan Azhari dkk. (2025) dengan kontribusi 71,75%, maupun Firdauziawati & Yudianto (2025) dengan kontribusi 25,8%, penelitian ini menemukan kontribusi yang jauh lebih kecil (0,3%). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan bersifat sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dan kondisi sosial masyarakat.

Temuan ini lebih sejalan dengan penelitian Bolqiah (2025) yang menyatakan bahwa pendidikan tidak selalu menghasilkan konsistensi perilaku politik, serta Putra dkk. (2023) yang menegaskan bahwa pendidikan pemilih yang bersifat langsung dan kontekstual lebih efektif dibandingkan pendidikan formal. Perbedaan hasil dengan penelitian internasional seperti Afzal *et*

al. (2024) dan Eda (2024) menunjukkan adanya *contextual gap* antara negara maju dengan konteks rural area di Indonesia: mekanisme cognitive capacity dan political efficacy yang dijelaskan oleh Persson (2015) tidak berjalan optimal ketika faktor sosial kolektif, kepercayaan politik, dan mobilisasi komunitas lebih dominan membentuk perilaku elektoral masyarakat.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa temuan menarik lain yang memperkaya pembahasan. Pertama, meskipun secara statistik tidak signifikan, terdapat perbedaan pola kognitif yang nyata antara kelompok pendidikan tinggi dan rendah pada dimensi kapasitas kognitif dan literasi politik, namun perbedaan tersebut tidak otomatis memengaruhi keputusan untuk berpartisipasi. Kedua, dimensi *political efficacy* menunjukkan pola yang relatif serupa antar kelompok pendidikan, mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap sistem politik merupakan determinan yang lebih universal dari pendidikan formal. Ketiga, fenomena penurunan drastis partisipasi pada PSU 2025 (dari 71,89% menjadi 64,5%) lebih banyak dipengaruhi oleh *political fatigue* akibat penyelenggaraan pemilu ulang, bukan semata-mata oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

IV. KESIMPULAN (5-10%)

Penulis menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2025, dengan nilai signifikansi 0,552 (> 0,05) dan nilai R Square hanya 0,003 (0,3%). Partisipasi politik masyarakat di *rural area* seperti Kabupaten Pesawaran lebih banyak ditentukan oleh faktor sosial budaya, kepercayaan politik, dan mobilisasi komunitas dibandingkan kapasitas individu yang dibentuk oleh pendidikan formal. Guna meningkatkan partisipasi pemilih, disarankan: (1) pemerintah daerah mengembangkan program pendidikan politik masyarakat yang aplikatif dan kontekstual, bukan hanya berfokus pada peningkatan pendidikan formal; (2) KPU memperkuat strategi sosialisasi pemilu berbasis komunitas dan media digital yang menyasar masyarakat pedesaan; (3) transparansi dan kualitas penyelenggaraan pemilu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap sistem demokrasi lokal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama berupa cakupan lokasi yang hanya berfokus pada Kabupaten Pesawaran dengan 103 responden, serta tidak menganalisis variabel mediator seperti kepercayaan politik, paparan media, dan motivasi sosial yang diduga berkontribusi besar terhadap partisipasi pemilih.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work)*. Penulis menyarankan penelitian lanjutan yang menggunakan regresi berganda atau *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan menambahkan variabel literasi politik, kepercayaan politik, dan paparan media, serta memperluas lokasi penelitian ke kabupaten/kota lain di Lampung untuk memperoleh gambaran komparatif yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bapak Hardiyanto Rahman, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga kepada KPU Kabupaten Pesawaran, BPS Kabupaten Pesawaran, dan seluruh responden pemilih yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh sivitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri, khususnya Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si selaku Rektor IPDN, Bapak Dr. Andi Pitono, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Politik Pemerintahan, dan Bapak Dr. Meliasta Hapri Tarigan, AP., M.Si selaku Ketua Program Studi Politik Indonesia Terapan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afzal, H., Ganga, D., Roy, O., & Thompson, K. (2024). Navigating through educational pathways to political participation: A multi-theoretical exploration of voting behaviors. *Midwest Political Science Association Meeting*, *46*(2), 233–252. https://www.researchgate.net/publication/391282686_Navigating_through_Educational_Pathways_to_Political_Participation_A_Multi-theoretical_Exploration_of_Voting_Behaviors

Azhari, S., Wibawani, S., & Millensyah, E. W. (2025). Pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik Generasi Z pada Pilkada Serentak 2024. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *6*(4). https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/5206

Bolqiah, L. H. (2025). Liberal or lost? How political education and social media shape the ideological maze of students. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, *38*(2), 187–201. https://doi.org/10.20473/mkp.v38i22025.187-201

Eda, K. (2024). *The effect of education on voter turnout and its mechanism*. Gakushuin University.

Firdauziawati, S.D., & Yudianto, H. (2025). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik dalam Pilkada Kabupaten Trenggalek Tahun 2024. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, *1*. https://jurnal.stkippgritrenggalek.ac.id/index.php/jped/article/view/1082

Karolčík, Š., Steiner, J., & Čipková, E. (2025). Politics and political literacy in education from the perspective of the public. *Cogent Education*, *12*(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2457560

Katadata Media Network. (2024). *Data 2024: Jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran 494,18 ribu jiwa*. Databoks Katadata. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/data-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-pesawaran-494-18-ribu-jiwa

KPU Kabupaten Pesawaran. (2025). *Data partisipasi pemilih Pilkada Kabupaten Pesawaran 2015-2025*. KPU Pesawaran.

Persson, M. (2015). Education and political participation. *British Journal of Political Science*, *45*(3), 689–703. https://doi.org/10.1017/S0007123413000409

Putra, K. B., Farhaini, A., Aini, D., Nurjannah, S., Noviana., & Ismi, R. (2023). Voter education to increase community participation in the 2024 General Elections (Case Study of KPU Malang Regency). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(18), 806–826. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/5889

Sadeli, E. H. (2025). Strengthening democracy through campus: The influence of education on student political participation. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, *17*(1), 99–110. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v17i1.6762

Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian*. Unri Press.

Pitono, A., Harahap, A.S., Kartiwi,K., & Baidhowah,A. R. (2023). Informal Institutions, Government Regulatory Functions, and Development of Governance Studies. *Jurnal*

Politik Pemerintahan Dharma Praja, *16*(2), 107-123. https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i2.3746

Wiramadana., Khairi, H., Ardieansyah., Pambayun, K.G., & Barus, I.A. (2025). Evaluation of the Quality of Use oh the Makaverse News Application Regarding the Digital Divide in Makassar City, Indonesia. *International Journal of Kybernology*, *6*(2). https://doi.org/10.33701/ijok.v6i2.5843